

DAFTAR PUSTAKA

Henny Juliani. 2017. *Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain*. Jurnal Law Reform. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017

Ibid, Pasal 92 ayat (3)

ibid, Pasal 92 ayat (4)

Ibid, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 55 ayat (1)

Ibid, Pasal 58

Eddy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 1.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 123.

Muladi *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni 2002 Bandung.

Andi Hamzah (1), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 10

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 144.

Damanhuri Fattah, *"Teori Keadilan Menurut John Rawls"*, Jurnal TAPi's, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 32. 22*ibid.*, hlm. 32-33. 23

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

Komaridah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2001), hlm.12

Djojodirdjo dan M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 53

Ibid., hlm. 55

- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: FHUI, 2003), hlm. 91-96
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.2
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Op. Cit., Pasal 2 ayat (1)
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Op. Cit., Pasal 2 ayat (1)
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 165
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 96-97.
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Djambatan*, Jakarta, 2007, hlm. 150
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, op.cit*, hlm. 42-43
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern*, hlm. 61-62
- Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung*, op.cit, hlm. 92
- Pasal 3 Pasal 2 Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.34

- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.55
- Achmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, h.97
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Op. Cit, h. 67
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 34
- Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN)
- Pasal 2 Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN)
- Desly S. Mokobimbing, 2015, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015, diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:seWD852laHgJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/8072/7633+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3
- Brda Nawawi Arief, 2013, *Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Bahan-1 Pelatihan Hakim Militer*, Surabaya
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 392
- Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006), hlm. 1-2
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 194

Djoko Prakoso dkk, Op. Cit, hlm. 395

Ifitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 7

Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Mukti, Bekasi, hlm 2

Zaeni Asyhadie, hlmn. 102

Ibid, hlmn. 105

Marwan Effendy, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Dictum, Jakarta, 2005, h.17

Denis Keenan & Josephine Biscare, Smith & Keenan's Company Law For Students, *Financial Times*, Pitman Publishing, 1999, h. 317

Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 ayat1

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang "*Keuangan Negara*"

Desly S. Mokobimbing, 2015, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

Rusli Muhammad, *Asas-asas Hukum Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 124

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pasal 97 ayat 5 Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 35 ayat (1) KUHP